

BAB I

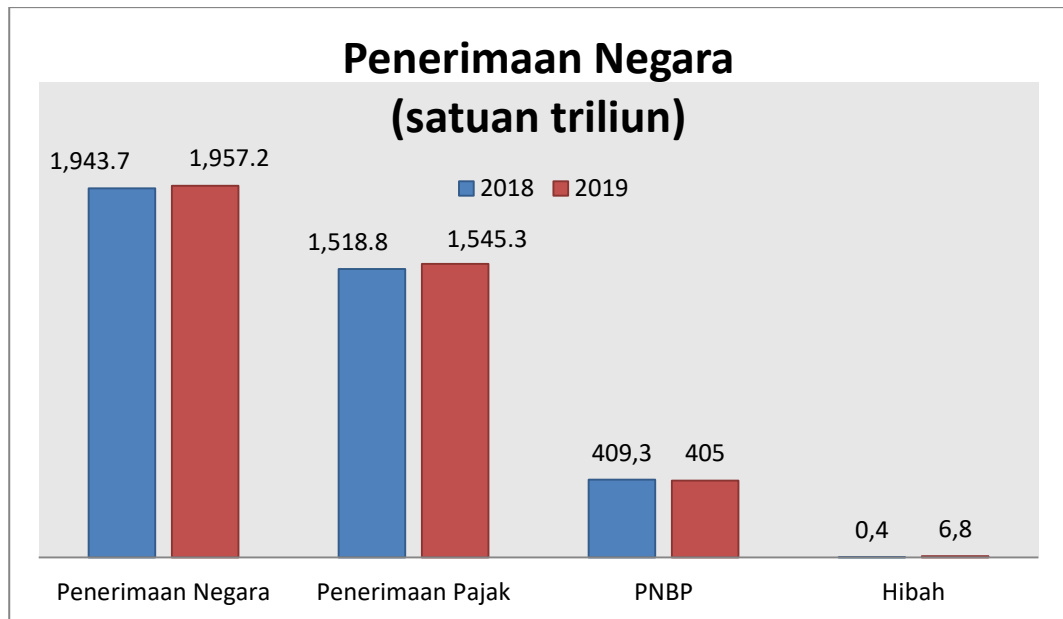
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, maka pemerintah harus meningkatkan infrastruktur, pemerataan sosial ekonomi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta aspek lainnya untuk memajukan Negara Indonesia, hal tersebut dapat ditingkatkan dengan adanya pajak karena pendapatan negara yang paling besar yaitu dari sektor perpajakan, pajak merupakan iuran wajib bagi seseorang atau sekelompok orang atas penghasilan atau pendapatan yang harus dibayarkan kepada negara dan bersifat memaksa tanpa adanya imbalan yang dirasakan secara langsung, diatur dalam undang undang yang berlaku serta dipergunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia (Resmi, 2017).

Pajak berfungsi untuk menstabilkan sosial dan ekonomi yang sangat penting bagi kemakmuran masyarakat. Pendapatan negara indonesia dapat dimaksimalkan dari sektor pajak seperti Pajak Pertambahan Nilai, Bea Cukai, Bea Materai dan Pajak Penghasilan (PPh), banyaknya objek yang dikenakan pajak membuat pajak menjadi penyumbang terbesar untuk memperoleh pendapatan negara.

Pendapatan negara dapat dilihat dari grafik dibawah ini :



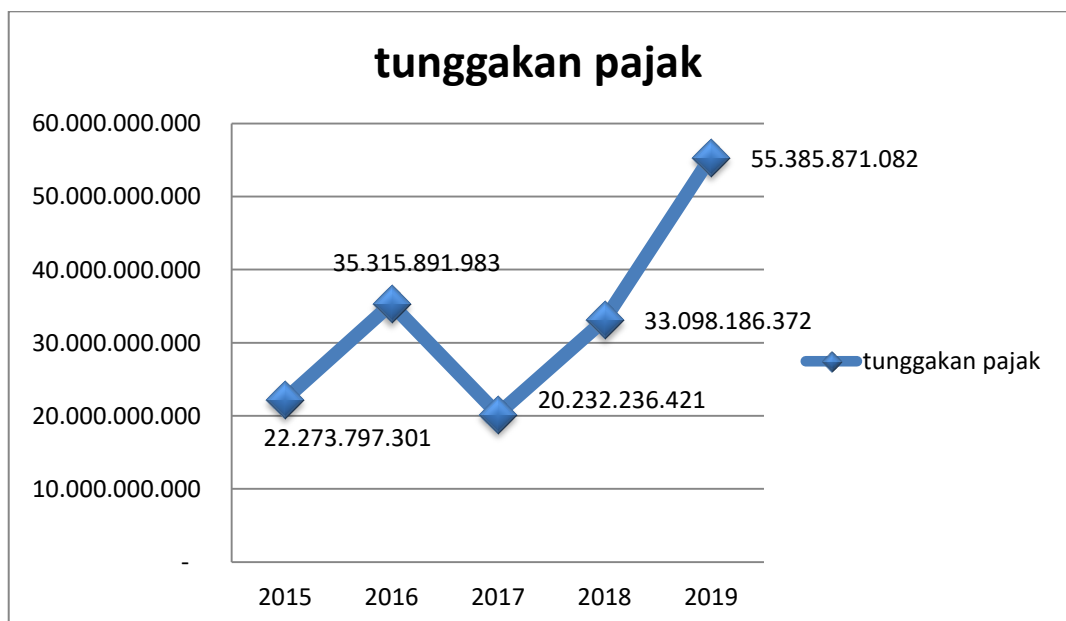
Sumber: Hairunnisa, 2020

Gambar 1.1
Penerimaan Negara Tahun 2018 dan 2019

Pendapatan negara Indonesia di tahun 2019 mencapai Rp1.957,2 triliun atau 90,4% dari sasaran APBN 2019 yg sebesar Rp2.165,1 triliun. Angka ini mengalami kenaikan sebanyak 0,7% dibandingkan tahun 2018 sebanyak Rp1.943,7 triliun. Realisasi itu dari asal penerimaan perpajakan mencapai Rp1.545,3 triliun atau telah mencapai 86,5 % dari target yang sebesar Rp1.786,4 triliun. angka ini pun tumbuh tipis 1,7% dibandingkan realisasi periode tahun sebelumnya yang sebesar Rp 1.518,8 triliun, kemudian dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebanyak Rp405 triliun atau setara dengan 107,1% asal target yang sebesar Rp378,3 triliun. Angka ini turun 1% berasal realisasi tahun 2018 yang sebesar Rp409,3 triliun, sedangkan dana hibah berhasil terkumpul mencapai Rp6,8 triliun atau tumbuh sebesar

1.560% berasal sasaran yang sebanyak Rp400 miliar (Hairunnisa, 2020). Maka dari itu pajak menjadi suatu kewajiban bagi seluruh masyarakat yang memiliki penghasilan, selain penghasilan ada beberapa hal yang dikenakan pajak seperti PPN, PPnBM Bea Cukai dan Bea Materai.

Orang yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak atas penghasilan yang diterima adalah Wajib Pajak (WP). Pendapatan negara digunakan atau dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemerintahan dan kebutuhan lainnya, sesuai dengan persentase yang dijelaskan bahwa pajak sangat berpengaruh dalam membangun negara Indonesia dengan membangun kesadaran Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Tunggakan pajak di KPP Pratama Sukabumi ditunjukkan dalam gambar 1.2



Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Sukabumi, 2020

Gambar 1.2
Tunggakan pajak di kantor Pelayanan Pajak
Pratama Sukabumi

Dari gambar grafik tersebut, dapat dilihat bahwa kenaikan tunggakan pajak terjadi 2 tahun terakhir. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak Wajib Pajak yang kurang peduli untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan mengakibatkan kasus tunggakan pajak semakin kompleks. Jika Wajib Pajak tidak bekerjasama dengan otoritas perpajakan dalam menyelesaikan permasalahan utang pajaknya, maka permasalahan tersebut akan masuk ke tahap selanjutnya yaitu penyitaan, pelelangan dan pemblokiran. Sebelum melakukan tindakan penyitaan pelelangan atau pemblokiran, otoritas pajak melakukan penagihan terlebih dahulu, penagihan pajak merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh otoritas pajak agar wajib pajak dapat melunasi pajak yang masih terutang serta biaya penagihan pajaknya (Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Sukabumi, 2020).

Wajib Pajak yang memiliki tunggakan pajak dan tidak bermaksud untuk beriktikad baik pada saat dilakukan penagihan secara aktif seperti tidak merespon jika mendapatkan Surat Teguran, Surat Paksa ataupun Surat Perintah untuk Melaksanakan Penyitaan barang barang Wajib Pajak, maka otoritas pajak dapat mengakses rekening bank yang digunakan oleh Wajib Pajak yang bermasalah dan akan dilakukan pemblokiran pada rekening wajib pajak. Pemblokiran rekening Wajib Pajak sangatlah wajar, Direktorat Jendral Pajak (DJP) mengaku telah memblokir ribuan rekening bank milik Wajib Pajak yang nakal setiap tahunnya (Quddus, 2017).

Permasalahan yang timbul akibat Wajib Pajak yang memiliki tunggakan dan tidak memiliki iktikad baik untuk melunasi tunggakan utang pajak salah satunya yaitu pemblokiran rekening, maka penulis tertarik mengambil judul untuk Laporan Tugas Akhir yaitu **“Tinjauan Atas Pemblokiran Rekening Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukabumi”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Seperti yang telah dipaparkan dalam latar belakang maka identifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Pemblokiran Rekening Bank Wajib Pajak ?
2. Bagaimana Mekanisme Pemblokiran Rekening Bank Wajib Pajak Jika Terjadi Di Luar Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Tempat Wajib Pajak Terdaftar Atau Sesuai Domisili Wajib Pajak?
3. Bagaimana Tindak Lanjut Proses Pemblokiran Rekening Bank Wajib Pajak?
4. Siapa Saja Pihak Pihak Yang Terlibat dan Memiliki Wewenang Dalam Pemblokiran Rekening Bank Wajib Pajak?
5. Apa Saja Hambatan Dalam Pelaksanaan Pemblokiran Rekening Bank?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

A. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dapat diambil sesuai dengan identifikasi masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses pemblokiran rekening bank.
2. Mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses pemblokiran rekening bank jika bank tersebut berada di luar wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak.
3. Mengetahui tindak lanjut dari proses pemblokiran rekening bank
4. Mengetahui pihak-pihak yang terlibat dan memiliki wewenang dalam proses pemblokiran rekening bank.
5. Mengetahui hambatan-hambatan saat pelaksanaan pemblokiran.

B. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis

Dapat diajukan sebagai Tugas Akhir untuk Program Diploma III Perpajakan dan menambah wawasan dari sektor perpajakan serta dapat menganalisis tingkat pemblokiran pada rekening yang telah dilakukan KPP Pratama Sukabumi, langkah langkah yang harus dilakukan dalam proses pemblokiran rekening di dalam dan di luar wilayah kerja KPP, pihak pihak yang

memiliki keterkaitan dalam proses pemblokiran rekening, tindak lanjut dari pemblokiran rekening dan hambatan pada pelaksanaan pemblokiran rekening.

2. Bagi perusahaan

Wajib pajak dapat mengetahui bahwa adanya sistem perpajakan yang melakukan pemblokiran rekening jika kewajiban utang pajaknya tidak terpenuhi, mengetahui langkah langkah pemblokiran rekening serta pencabutan pemblokiran rekening dan tindak lanjut yang dapat dilakukan otoritas pajak jika kewajiban tersebut masih belum dipenuhi.

3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Direktorat Jenderal Pajak dapat membuat proknoza atau perkiraan pendapat di setiap Kantor Pelayanan Pajak dalam hal pencairan di wilayah kerja masing masing Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak.

4. Bagi pihak lainnya

Hasil dari penulisan ini dapat dijadikan referensi untuk memenuhi tugas serta menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca mengenai tingkat pemblokiran pada rekening yang telah dilakukan KPP Pratama Sukabumi, langkah langkah yang harus dilakukan dalam proses pemblokiran rekening didalam dan di luar wilayah kerja, pihak pihak yang terlibat dan memiliki

kewenangan dalam proses pemblokiran rekening serta tindak lanjut dari pemblokiran rekening.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu pemecahan masalah yang sedang diteliti berdasarkan apa yang kita dapat di lapangan secara observasi, wawancara, dan lain-lain dengan tujuan untuk mengetahui apa yang menjadi permasalahan yang sedang dipertanyakan. Penelitian yang menggunakan metode deskriptif memiliki beberapa ciri-ciri pokok seperti dalam memusatkan perhatian untuk masalah-masalah yang sedang diteliti dan menggambarkan fakta-fakta yang sedang diselidiki sesuai dengan keadaan nyatanya dengan menginterpretasikan secara rasional agar tidak mengubah makna pada keadaan nyatanya (Amirudin, 2016).

1.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi langsung dan tidak langsung dan teknik komunikasi langsung (wawancara).

1. Teknik observasi langsung dan tidak langsung

Teknik observasi langsung merupakan cara yang dipakai untuk pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan melakukan pencatatan terhadap objek penelitian secara langsung di

tempat kejadian suatu peristiwa yang sedang diteliti, sedangkan teknik observasi tidak langsung merupakan cara yang dipakai untuk pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan melakukan pencatatan terhadap objek penelitian secara tidak langsung di tempat kejadian suatu peristiwa yang sedang diteliti. Dalam teknik observasi ini dapat mempergunakan alat pengumpul data seperti catatan berkala, daftar cek, skala nilai, peralatan mekanis, catatan, anekdot.

2. Teknik komunikasi langsung

Teknik komunikasi langsung merupakan teknik yang dilakukan untuk pengumpulan data dengan cara mengadakan kontak langsung dan menggali informasi secara lisan atau tatap muka dari subjek yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam teknik ini alat yang dapat di pergunakan seperti interview atau wawancara.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam suatu penulisan merupakan uraian untuk memuat suatu susunan yang dilakukan secara teratur dan terperinci sehingga gambaran dari suatu penelitian dapat terlihat dengan jelas. Sistematika yang digunakan dalam penelitian ini pembahasannya terbagi dalam lima bab karena masing masing bab memiliki keterkaitan dan saling melengkapi antara bab satu dengan bab yang lainnya sehingga bagian-bagian tersebut tidak dapat dipindahkan seperti dibawah ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan awal atau pembukaan dalam penelitian ini yang menjelaskan tentang latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, metode dan teknik penulisan, tujuan dan manfaat penulisan serta tempat dan waktu penelitian dilakukan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab yang akan membahas secara teoritis serta peraturan atau dasar hukum yang mengatur objek penelitian mengenai pajak, hak dan kewajiban wajib pajak, tunggakan pajak, penagihan pajak.

BAB III OBJEK PENELITIAN

Bab yang akan membahas mengenai pemblokiran rekening secara singkat dan sejarah serta keadaan tempat penelitian berlangsung.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab yang akan membahas mengenai pemblokiran secara meluas sesuai dengan rumusan masalah seperti tingkat pemblokiran pada rekening yang telah dilakukan KPP Pratama Sukabumi, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses pemblokiran rekening di dalam dan di luar wilayah kerja KPP, pihak pihak yang memiliki keterkaitan dalam proses pemblokiran rekening, tindak lanjut dari pemblokiran rekening dan hambatan saat proses pemblokiran rekening bank.

BAB V PENUTUP

Bab ini akan membahas tentang kesimpulan yang berasal dari bab pembahasan serta saran yang diberikan oleh penulis sehubungan dengan penelitian ini.

1.7 Tempat Dan Waktu Penelitian

A. Tempat Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Sukabumi dengan alamat Jl. RE Martadinata Nomor 1 Kota Sukabumi.

B. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan untuk menganalisis serta memperoleh data yang dibutuhkan untuk penelitian yang berjudul “TINJAUAN ATAS PEMBLOKIRAN REKENING WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA SUKABUMI”, penulis membutuhkan waktu kurang lebih 4 (empat) bulan dimulai dari 2 maret 2020 sampai dengan 30 juni 2020 jadwal penelitian tertera dalam tabel 1.1

Tabel 1.1
Jadwal Penelitian

NO	KETERANGAN	BULAN																			
		MARET				APRIL				MEI				JUNI				JULI			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Praktek Kerja Lapangan (PKL)	■	■																		
2	Pengumpulan data LTA	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
3	Pengajuan Judul		■	■																	
4	Penyusunan LTA			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
5	Bimbingan									■	■	■	■	■	■	■	■				
6	Artikel dan Infografis																	■	■		
7	Sidang																			■	■